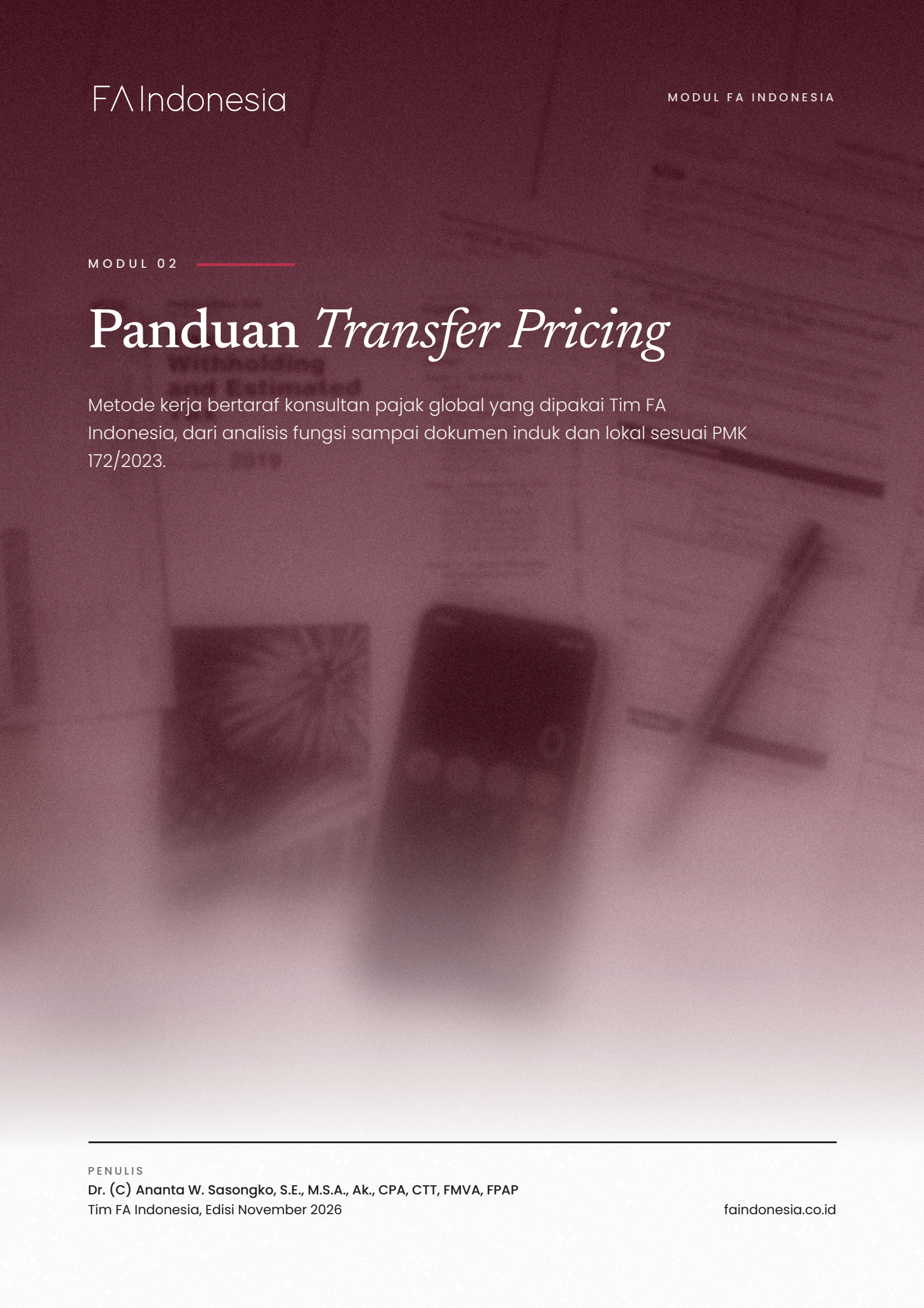
MODUL 02

Panduan *Transfer Pricing*

Metode kerja bertaraf konsultan pajak global yang dipakai Tim FA Indonesia, dari analisis fungsi sampai dokumen induk dan lokal sesuai PMK 172/2023.



PENULIS

Dr. (C) Ananta W. Sasongko, S.E., M.S.A., Ak., CPA, CTT, FMVA, FPAP

Tim FA Indonesia, Edisi November 2026

ISI MODUL

Daftar Isi

01 Siapa Mengerjakan Apa

02 Delapan Langkah Kerja Dokumen Transfer Pricing

03 Contoh Benchmarking dan Dampaknya

04 Saat Model Operasi Grup Berubah

05 Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

06 Kalender Kepatuhan Tahunan

07 Cara Tim FA Indonesia Memakai Pola Ini

08 Rujukan

Cara Memakai Modul Ini

Bab 1 menjelaskan siapa mengerjakan apa. Bab 2 adalah inti modul: urutan kerja untuk menyusun dokumen induk (master file) dan dokumen lokal (local file). Bab 3 memperlihatkan bagaimana satu angka margin bisa berubah menjadi koreksi pajak. Bab 6 bisa ditempel di meja tim pajak sebagai kalender kerja.



PENULIS

Dr. (C) Ananta W. Sasongko, S.E., M.S.A., Ak., CPA, CTT, FMVA, FPAP

CFO dan Direktur Keuangan, ex-EY. Certified Public Accountant (IAPI), FMVA dan FPAP (CFI). Kandidat doktor ilmu akuntansi. Menulis modul ini bersama Tim FA Indonesia sebagai metode dasar setiap penugasan FA Indonesia.

Modul ini bahan belajar umum, bukan nasihat hukum, pajak, atau investasi untuk kasus tertentu. Nama firma disebut sebagai rujukan praktik yang dipublikasikan secara umum; FA Indonesia tidak berafiliasi dengan firma tersebut, dan nama unit layanan firma dapat berubah dari waktu ke waktu. Angka dalam contoh adalah ilustrasi.

BAB 01

Siapa Mengerjakan Apa

Transfer pricing adalah penetapan harga atas transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Prinsipnya satu: harga harus sama dengan yang akan disepakati pihak independen dalam kondisi sebanding, atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Karena intinya kepatuhan pajak, pekerjaan sehari-hari transfer pricing ada di lensa angka dan pajak: kebijakan harga, dokumen, benchmarking, dan sengketa. Lensa strategi masuk lebih awal ketika grup mengubah model operasi, misalnya memusatkan pembelian, memindahkan fungsi riset, atau membentuk perusahaan prinsipal regional. Perubahan itu menentukan siapa yang berhak atas laba, sehingga dokumen transfer pricing yang kuat selalu mengikuti kenyataan bisnis, bukan sebaliknya. Pola kerja ini sama dengan yang dipakai praktik transfer pricing jaringan akuntan publik global seperti EY, KPMG, PwC, dan Deloitte, dan kami terapkan dengan skala yang pas.

PEKERJAAN	LENSA ANGKA	LENSA STRATEGI	PIHAK LAIN
Kebijakan harga grup	Desain kebijakan dan metode	Desain model operasi dan rantai nilai	CFO grup, komite pajak
Dokumentasi tahunan	Master file, local file, CbCR, benchmarking	Tidak umum	Tim pajak internal
Kesepakatan di muka	Advance Pricing Agreement (APA)	Tidak umum	DJP, otoritas pajak mitra
Sengketa	Pemeriksaan, keberatan, prosedur persetujuan bersama (MAP)	Tidak umum	Kuasa hukum pajak, pengadilan pajak
Restrukturisasi grup	Dampak pajak dan transfer pricing	Alasan bisnis dan rancangan operasi	Konsultan hukum

Metode yang Kami Pakai

Bertumpu pada Panduan OECD

Analisis mengikuti OECD Transfer Pricing Guidelines, dengan Pedoman BEPS Action 13 untuk struktur tiga lapis dokumen.

Analisis Fungsi Lebih Dulu

Wawancara manajemen untuk memetakan fungsi, aset, dan risiko sebelum menyentuh angka.

Basis Data Pembanding

Pencarian perusahaan sebanding memakai basis data komersial seperti Orbis atau TP Catalyst, dengan saringan kuantitatif dan kualitatif yang terdokumentasi.

Satu Kebijakan, Banyak Negara

Jaringan global dipakai untuk menjaga konsistensi dokumen grup di setiap negara tempat anggota grup beroperasi.

BAB 02

Delapan Langkah Kerja Dokumen Transfer Pricing

01 Pemetaan Grup dan Transaksi Afiliasi

YANG DIKERJAKAN — Struktur kepemilikan dan penguasaan, daftar pihak afiliasi, serta seluruh transaksi afiliasi: barang, jasa, bunga, royalti, sewa, penjaminan, dan pengalihan aset.

KELUARAN — Bagan grup dan matriks transaksi afiliasi yang cocok dengan catatan atas laporan keuangan.

02 Uji Kewajiban Dokumen (Threshold)

YANG DIKERJAKAN — Menurut PMK 172/2023, wajib pajak yang bertransaksi afiliasi wajib menyelenggarakan master file dan local file bila pada tahun pajak sebelumnya peredaran bruto lebih dari Rp50 miliar, transaksi barang berwujud dengan afiliasi lebih dari Rp20 miliar, atau transaksi jasa, bunga, dan pemanfaatan harta tak berwujud dengan afiliasi lebih dari Rp5 miliar, atau bertransaksi dengan afiliasi di yurisdiksi bertarif pajak lebih rendah dari tarif PPh badan Indonesia. Induk grup dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 triliun juga wajib menyusun laporan per negara (CbCR).

KELUARAN — Memo kewajiban dokumen per entitas per tahun.

03 Analisis Industri dan Bisnis

YANG DIKERJAKAN — Kondisi industri, pemicu laba, siklus usaha, dan strategi bisnis grup yang memengaruhi harga.

KELUARAN — Bagian analisis industri dalam local file.

04 Analisis Fungsi, Aset, dan Risiko

YANG DIKERJAKAN — Siapa menjalankan fungsi apa, siapa memiliki aset apa, dan siapa yang sungguh mengendalikan serta mampu menanggung risiko. Untuk harta tak berwujud, dipetakan fungsi DEMPE: pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, perlindungan, dan eksploitasi.

KELUARAN — Karakterisasi entitas, misalnya distributor rutin, manufaktur kontrak, penyedia jasa rutin, atau entitas wirausaha penuh.

05 Pemilihan Metode dan Pihak yang Diuji

YANG DIKERJAKAN — Memilih metode paling tepat dari metode yang diatur PMK 172/2023, termasuk lima metode utama: perbandingan harga (CUP), harga penjualan kembali, biaya plus, pembagian laba, dan margin laba bersih transaksional (TNMM). Ditentukan juga pihak yang diuji dan indikator labanya, misalnya margin operasi, net cost plus, atau Berry ratio.

KELUARAN — Alasan pemilihan metode, termasuk alasan menolak metode lain.

06 Benchmarking

YANG DIKERJAKAN — Pencarian perusahaan sebanding di basis data, saringan kuantitatif (independensi, data lengkap, rugi berulang) dan kualitatif (fungsi dan produk), lalu rentang interkuartil dari data beberapa tahun.

KELUARAN — Daftar pembanding, alasan setiap penolakan, dan rentang kewajaran.

07 Penyusunan Master File dan Local File

YANG DIKERJAKAN — Dokumen disusun dengan data yang tersedia saat transaksi terjadi (pendekatan ex ante). Master file dan local file harus tersedia paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, disertai surat pernyataan saat tersedianya dokumen, dan ikhtisarnya dilampirkan pada SPT Tahunan. CbCR tersedia paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak.

KELUARAN — Master file, local file, ikhtisar untuk SPT, dan surat pernyataan.

08 Pemantauan, Penyesuaian, dan Kesiapan Pemeriksaan

YANG DIKERJAKAN — Memantau margin sepanjang tahun, melakukan penyesuaian sebelum tutup buku bila keluar rentang, menyiapkan berkas bila dokumen diminta (diserahkan paling lama satu bulan sejak permintaan), dan menimbang APA untuk transaksi besar yang berulang.

KELUARAN — Laporan pemantauan triwulanan dan berkas siap pemeriksaan.

BAB 03

Contoh Benchmarking dan Dampaknya

Ilustrasi: PT D adalah distributor rutin produk grup di Indonesia dengan penjualan Rp400 miliar dan margin operasi 1,2%. Metode yang dipilih TNMM dengan margin operasi sebagai indikator laba.

PEMBANDING	MARGIN OPERASI
Pembanding A	1,5%
Pembanding B	2,0%
Pembanding C	2,4%
Pembanding D	3,1%
Pembanding E	3,7%
Pembanding F	4,4%
Pembanding G	5,0%
Pembanding H	6,2%

RENTANG KEWAJARAN	MARGIN
Kuartil bawah	2,30%
Median	3,40%
Kuartil atas	4,55%
PT D	**1,20%**

Kuartil dihitung dengan interpolasi linear atas delapan data.

Bila Margin di Luar Rentang

PERHITUNGAN	RP MILIAR
Selisih margin terhadap median: 3,40% dikurangi 1,20% = 2,20%	
Potensi koreksi laba: 2,20% x Rp400 miliar	8,80
Potensi PPh badan tambahan: 22% x 8,80	1,94

Dalam praktik pemeriksaan, koreksi umumnya diarahkan ke titik tengah rentang. Angka di atas belum termasuk sanksi administrasi dan penyesuaian sekunder, yaitu selisih harga yang dapat diperlakukan sebagai dividen terselubung, yang menurut PMK 172/2023 berlaku untuk koreksi dalam negeri maupun lintas negara.

> Cara mencegah angka seperti ini adalah memantau margin setiap triwulan dan menyesuaikan harga sebelum tutup buku, bukan memperbaiki dokumen setelah tahun berakhir.

BAB 04

Saat Model Operasi Grup Berubah

Keputusan bisnis yang tampak tidak berhubungan dengan pajak sering mengubah siapa yang berhak atas laba.

INISIATIF BISNIS	DAMPAK KE TRANSFER PRICING
Pusat pengadaan regional	Muncul jasa pengadaan atau entitas pembeli prinsipal yang perlu imbal hasil wajar.
Pusat layanan bersama (shared service)	Biaya jasa intragrup perlu dasar alokasi, bukti manfaat, dan mark-up yang wajar.
Pemindahan riset atau merek	Fungsi DEMPE berpindah, sehingga imbalan atas harta tak berwujud dan kemungkinan pajak atas pengalihannya perlu dihitung.
Integrasi pascaakuisisi	Dua kebijakan harga yang berbeda harus disatukan tanpa menimbulkan selisih antarnegara.
Pembiayaan dalam grup	Bunga, penjaminan, dan cash pooling perlu diuji kewajarannya dan dikaitkan dengan aturan pembatasan biaya bunga.

Pajak Minimum Global

Sejak tahun pajak 2025 Indonesia menerapkan pajak minimum global 15% melalui PMK 136/2024 untuk wajib pajak badan yang menjadi bagian grup multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi global paling sedikit 750 juta euro. Bagi grup sebesar itu, perancangan model operasi kini perlu dihitung bersama tarif efektif per negara, sehingga perancang strategi dan tim pajak semakin sering bekerja di satu meja.

BAB 05

Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

1. **Dokumen disusun setelah tahun berakhir.** Padahal PMK 172/2023 menegaskan pendekatan ex ante: harga ditetapkan dengan data yang tersedia saat transaksi.
2. **Analisis fungsi tidak cocok dengan kenyataan.** Entitas ditulis sebagai distributor rutin, tetapi menanggung risiko persediaan dan piutang tanpa imbalan.
3. **Jasa intragrup tanpa bukti manfaat.** Tagihan manajemen dari induk tidak didukung laporan kegiatan, notulen, atau hasil kerja.
4. **Transaksi dalam negeri dilupakan.** Kewajiban dokumen tidak terbatas pada afiliasi luar negeri.

5. **Pembanding tidak sebanding.** Perusahaan dengan fungsi berbeda atau data tidak lengkap tetap dipakai.
6. **Angka dokumen berbeda dengan laporan keuangan.** Segmentasi laba tidak dapat direkonsiliasi ke laporan keuangan audited.
7. **Tidak siap dalam satu bulan.** Saat dokumen diminta pemeriksa, data pendukung tersebar di banyak orang dan folder.

BAB 06

Kalender Kepatuhan Tahunan

Untuk tahun buku Januari sampai Desember:

WAKTU	PEKERJAAN
Awal tahun	Tetapkan kebijakan harga dan margin target setiap transaksi afiliasi; perbarui perjanjian intragrup.
Setiap triwulan	Pantau margin aktual terhadap rentang; catat bukti manfaat jasa intragrup.
November sampai Desember	Penyesuaian harga sebelum tutup buku bila margin keluar rentang.
Januari sampai April	Perbarui benchmarking, susun master file dan local file, rekonsiliasi dengan laporan keuangan.
Paling lambat 30 April	Master file dan local file tersedia beserta surat pernyataan; ikhtisar dilampirkan pada SPT Tahunan badan.
Paling lambat 31 Desember	CbCR tersedia bagi grup yang wajib.
Saat diminta DJP	Serahkan dokumen paling lama satu bulan sejak permintaan.

- ☐ Bagan grup dan daftar pihak afiliasi terbaru
- ☐ Matriks transaksi afiliasi yang cocok dengan laporan keuangan
- ☐ Perjanjian intragrup yang ditandatangani dan berlaku
- ☐ Bukti manfaat jasa intragrup
- ☐ Perhitungan margin per transaksi per triwulan
- ☐ Arsip benchmarking dan alasan penolakan pembanding

BAB 07

Cara Tim FA Indonesia Memakai Pola Ini

Banyak grup usaha menengah baru menyadari kewajiban dokumen setelah peredaran brutonya melewati Rp50 miliar atau setelah menerima surat dari kantor pajak.

Tim FA Indonesia memakai urutan kerja yang sama dengan skala yang pas: pemetaan grup dan transaksi afiliasi, uji kewajiban dokumen, analisis fungsi, serta penyiapan data keuangan yang dapat direkonsiliasi ke laporan keuangan. Untuk penyusunan dokumen transfer pricing dan pendampingan pemeriksaan, pekerjaan dilakukan bersama konsultan pajak berizin yang ditunjuk klien.

Model Perikatan Kerja

TAHAP	ISI PEKERJAAN
Diagnosis	Membaca struktur grup dan laporan keuangan, lalu menguji apakah dokumen wajib disusun.
Penataan	Matriks transaksi afiliasi, perjanjian intragrup, dan kebijakan harga awal tahun.
Data pendukung	Segmentasi laba, rekonsiliasi ke laporan keuangan, dan bukti manfaat jasa.
Pemantauan	Pemantauan margin triwulanan sampai penyesuaian sebelum tutup buku.

BAB 08

Rujukan

- Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 18 tentang hubungan istimewa, sebagaimana diubah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.
- OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, edisi 2022.
- OECD/G20 BEPS Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting.
- Publikasi transfer pricing dan tax alert EY, KPMG, PwC, dan Deloitte Indonesia tentang PMK 172/2023.

FA Indonesia

LANGKAH BERIKUTNYA

Transaksi afiliasi yang rapi sejak awal tahun

Tim FA Indonesia membantu memetakan transaksi afiliasi, menguji kewajiban dokumen, menyusun analisis fungsi, dan menyiapkan data pendukung yang konsisten dengan laporan keuangan. Ceritakan struktur grup Anda, kita mulai dari diagnosis singkat.

Chat Ananta, CPA

faindonesia.co.id